

# **ANALISIS PENANGANAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI DESA DOPLANG, KECAMATAN TERAS, KABUPATEN BOYOLALI**

Lifia Puspitasari, Hardi Warsono

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***Abstract***

*Doplang village is included as one of the areas in Boyolali which is identified as slums and the criteria for waste management are considered inadequate. The implementation of waste management in Doplang Village is done by involving participation of the community, but it's still not optimal. CBSWM implementation is seen through legal, institutional, operational technical, financial, and community participation aspects. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of CBSWM in Doplang Village and identify the constraints on CBSWM in Doplang Village. In public management it's necessary to manage external relations. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the CBSWM in Doplang Village was carried out with a persuasive approach by the KSM Kampung Asri as a waste management party in Doplang 3R TPST. Constraints experienced are include lack of operational costs, understanding of environmental cleanliness isn't yet good, the lack of coordination between TPST 3R Doplang managers with parties from the TPA and related agencies. Suggestions that can be given are expansion of CBSWM area coverage by KSM Kampung Asri, as well as the need for technical assistance in developing CBSWM activities in Doplang Village and budgeting priorities by related agencies.*

***Keywords : Waste managemet, Community-Based, Public Managemet***

## **Abstrak**

Desa Doplang termasuk ke dalam salah satu wilayah di Kabupaten Boyolali yang teridentifikasi kumuh dan kriteria pengelolaan persampahannya dianggap kurang memadai. Pelaksanaan penanganan sampah di Desa Doplang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, namun masih belum maksimal dan belum dilakukan secara menyeluruh dalam wilayah desa. Pelaksanaan PSBM dilihat melalui aspek hukum, kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PSBM di Desa Doplang serta mengidentifikasi kendala dalam PSBM di Desa Doplang. Dalam manajemen publik perlu untuk mengelola hubungan luar agar terbentuk suatu hubungan yang sehat dimana semua pihak yang terlibat dapat merasakan kepuasan. Metode penelitian yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSBM di Desa Doplang dilakukan dengan pendekatan persuasif oleh KSM Kampung Asri sebagai pihak pengelola sampah di TPST 3R Doplang. Kendala yang dialami dalam PSBM di Desa Doplang diantaranya adalah kurangnya biaya operasional, pemahaman tentang kebersihan lingkungan yang belum sepenuhnya baik serta kurangnya koordinasi antara pengelola TPST 3R Doplang dengan pihak dari TPA dan dinas-dinas terkait. Saran yang dapat diberikan adalah perluasan cakupan wilayah PSBM oleh KSM Kampung Asri, serta perlunya pendampingan teknis dalam pengembangan kegiatan PSBM di Desa Doplang dan prioritas penganggaran oleh dinas terkait.

**Kata Kunci : Penanganan Sampah, Berbasis Masyarakat, Manajemen Publik**

## **PENDAHULUAN**

Desa Doplang merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Boyolali yang dinyatakan kumuh akibat pengelolaan sampahnya masih kurang memadai dalam upaya penanganan sampah. Penanganan sampah di Desa Doplang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat, namun hanya sebatas di 2 dukuh atau RT saja. Baru sekitar 11% persentase sampah domestik rumah tangga yang dapat terangkut ke TPS/TPA dua kali dalam satu minggu. Sekitar 89% sampah domestik rumah tangga masih belum dikelola dengan baik (Data Profil Desa Doplang, tahun 2018).

Upaya penanganan sampah di Desa Doplang, khususnya di Dukuh Karangwuni dan Karangmojo belum

maksimal dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat atau komunitas sebagai dasar pelaksana kegiatan, yaitu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Asri di TPST 3R Desa Doplang. Namun, proses pengolahan sampah di TPST 3R Desa Doplang tidak terlepas dari adanya masalah dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah masyarakat yang masih keliru dalam memilah sampah dan proses pembuatan paving yang menggunakan bahan baku lelehan sampah plastik dengan cara dibakar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan, serta mengidentifikasi kendala dalam Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Doplang.

Dalam manajemen publik, diperlukan adanya manajemen hubungan luar (*external relations*) yang bertujuan untuk membentuk suatu *network* yang sehat dimana semua pihak di dalamnya dapat merasakan kepuasan. Dalam penelitian, kendala diidentifikasi berdasarkan analisis lingkungan strategis, yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi bersama masyarakat. Berbasis masyarakat karena produsen utama adalah masyarakat, sehingga masyarakat harus bertanggung jawab terhadap sampah yang masyarakat produksi. Pelaksanaan Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) dapat dilihat melalui beberapa aspek pengelolaan sampah permukiman yang mencakup aspek persyaratan hukum, persyaratan kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.

## **METODA PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan dalam Analisis Penanganan Sampah di Desa Dopleng, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis data adalah dengan menganalisa fenomena penelitian, yaitu pelaksanaan PSBM dilihat melalui beberapa aspek pengelolaan sampah permukiman, serta kendala PSBM berdasarkan analisis lingkungan strategis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Dopleng**

Standar mengenai pengelolaan sampah di permukiman terdapat pada SNI 3242-2008. Pelaksanaan PSBM dilihat melalui beberapa aspek persyaratan umum dalam pengelolaan sampah permukiman

yang mencakup aspek persyaratan hukum, persyaratan kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, dan aspek peran serta masyarakat.

### **1.1 Aspek Persyaratan Hukum dalam PSBM**

Pelaksanaan penanganan sampah tidak terlepas dari peraturan atau perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Peraturan mengenai kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan PSBM di Desa Dopleng telah ditetapkan dalam peraturan desa. Peraturan desa tentang pengelolaan sampah ditetapkan dengan adanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R di Desa Dopleng. Program TPST 3R tersebut merupakan program dari Kementerian / Dinas Pekerjaan Umum.

Peraturan desa di Desa Dopleng tidak memuat mengenai besaran tarif retribusi. Tarif retribusi hanya ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara pihak masyarakat dengan pengelola TPST di Desa Dopleng, yaitu KSM Kampung Asri. Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila terdapat perubahan besaran tarif retribusi, sehingga tidak perlu mengubah peraturan desa yang sudah ditetapkan. Adapun besaran tarif retribusi menyesuaikan perkembangan atau kondisi penanganan sampah.

### **1.2 Aspek Persyaratan Kelembagaan dalam PSBM**

Komitmen pengelola dalam peningkatan kinerja institusi PSBM di Desa Dopleng sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas pada unit kegiatan dalam KSM Kampung Asri untuk dapat terus berinovasi dan produk olahan sampahnya mendapat pangsa pasar.

KSM Kampung Asri berkomitmen untuk mengubah sampah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai guna dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat

Sistem dan institusi persampahan telah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan retribusi, yang dapat dilihat dengan adanya KSM Kampung Asri sebagai kelompok pengolah sampah di TPST 3R Desa Dopleng beranggotakan sejumlah 50 orang warga sebagai pengurus. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan telah mandiri dan secara sadar dilakukan, namun hanya dalam lingkup dukuh Karangwuni dan Karangmojo.

### **1.3 Aspek Teknis Operasional dalam PSBM**

Kegiatan KSM Kampung Asri menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam hal penanganan sampah. Masyarakat di Desa Dopleng dianggap memiliki peranan yang sangat besar dalam pengelolaan sampah, yaitu selaku pemilah sampah di rumah tangga.

Penerapan teknik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di sumber dan di TPS dalam pelaksanaan PSBM di Desa Dopleng, khususnya di Dukuh

Karangwuni dan Karangmojo, dianggap memiliki level maupun bagian kerja masing-masing. *Reduce* dan *reuse* terkait dengan permasalahan perilaku masyarakat secara individu. Sedangkan *recycle* merupakan proporsi pihak pengelola persampahan di TPST 3R Desa Dopleng.

Pihak pengelola TPST 3R yaitu masyarakat yang tergabung dalam KSM Kampung Asri di Desa Dopleng senantiasa berharap agar sampah yang masuk di TPST 3R dapat diolah semaksimal mungkin agar dapat memiliki nilai manfaat.

### **1.4 Aspek Pembiayaan dalam PSBM**

Sumber pendanaan dan struktur pembiayaan yang dilakukan dalam PSBM di Desa Dopleng pada awalnya hanya berasal dari retribusi warga. Namun, uang retribusi tersebut hanya dapat digunakan untuk proses pengambilan sampah dan tidak mencukupi untuk dana operasional dalam proses produksi.

KSM Kampung Asri pada tahun 2012-2014 memperoleh

anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sesuai dengan kebutuhan tiap tahun dengan adanya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan membeli mesin dan membuat bangunan. Namun uang tersebut tidak bersifat *fresh money* atau uang *cash* yang dapat langsung diberikan sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Pada awal tahun 2017, beberapa unit usaha KSM Kampung Asri yang produktif bekerja sama dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berasal dari dana desa.

Pola retribusi yang diterapkan di Desa Doplang yaitu melalui jimpitan maupun langsung termasuk ke dalam kas Rukun Tetangga (RT). Pengaturan penarikan uang retribusi setiap bulan diserahkan kepada masing-masing permukiman atau ketua RT setempat.

### **1.5 Aspek Peran Serta Masyarakat dalam PSBM**

Bentuk peran serta masyarakat dalam PSBM di Desa Doplang yang

paling penting adalah sebagai pemilah sampah di sumber atau pada masing-masing rumah tangga. Beberapa warga bertugas sebagai petugas pengambil sampah, serta sejumlah 50 orang warga menjadi pengelola dalam KSM Kampung Asri dan di TPST 3R Desa Doplang.

Program yang dilakukan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat telah dilakukan tidak hanya dengan pihak KSM Kampung Asri sebagai pihak pengelola TPST 3R, melainkan telah bersinergi dengan tim lain seperti kader kesehatan Desa Doplang dan tim dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Peran aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan diantaranya adalah dalam bentuk tim, yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja 4 PKK, kader kesehatan, Forum Kesehatan Desa (FKD), dan Keluarga Kelompok Tani (Gapoktan).

## **2. Kendala Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM)**

Kendala PSBM dalam penelitian ini diidentifikasi melalui pelaksanaan beberapa aspek yang dapat memengaruhi PSBM, baik mencakup persyaratan umum

### **2.1 Kendala Internal PSBM**

Kendala internal PSBM mencakup sumber daya dan partisipasi masyarakat terkait harapan produk perancangan program dapat membentuk perilaku yang meliputi pemahaman masyarakat mengenai kebersihan lingkungan, kesediaan masyarakat dalam mewujudkan kebersihan lingkungan, peran aktif masyarakat dalam memberikan kritik maupun saran yang membangun dalam PSBM.

Kendala yang dialami dalam PSBM adalah terkait dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional penanganan sampah. Selain itu, kendala terkait dengan sumber daya yaitu jumlah sampah di Desa Dopleng tidak mencukupi kebutuhan untuk membuat produk inovasi olahan sampah yang

berbahan plastik, salah satunya adalah dalam pembuatan paving bergaransi.

Pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan belum dapat dikatakan sudah baik secara keseluruhan, melainkan masih pada tahapan yang ingin diciptakan, karena hal tersebut terkait dengan kebiasaan. Adapun pemahaman mengenai kebersihan lingkungan diberikan dengan pola pendekatan persuasif.

Kesediaan masyarakat dalam mengikuti prosedur atau tata cara pemeliharaan kebersihan belum dapat dikatakan baik, karena hal tersebut terkait dengan kesadaran masing-masing individu.

Keaktifan masyarakat dalam memberi masukan berupa kritik dan saran yang membangun dalam PSBM belum dapat dikatakan telah aktif secara keseluruhan. Adapun sebagian masyarakat memberikan kritik yang tidak membangun, melainkan atas dasar rasa malas dalam melakukan pemilahan sampah.

## 2.2 Kendala Eksternal PSBM

Kendala eksternal PSBM merupakan segala sesuatu hal berkaitan antara PSBM di Desa Doplang dengan luar Desa Doplang yang dapat menghambat pelaksanaan PSBM sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang maksimal.

Komunikasi dan koordinasi antara pihak TPST dengan TPA masih kurang. Kendala terkait hal tersebut adalah kurangnya pemahaman pihak pengelola TPST tentang prosedur untuk dapat memanfaatkan sampah plastik yang tidak dapat diolah di TPA, serta belum adanya fasilitasi untuk berdiskusi dari pemerintah mengenai hal tersebut.

Kendala yang dialami terkait kesesuaian seluruh tahapan pelaksanaan PSBM yang telah dilakukan dengan prosedur dan berdasar undang-undang yang berlaku adalah adanya proses pembakaran sampah dalam pembuatan produk inovasi olahan sampah yang memerlukan bahan

lelehan plastik dalam pembuatannya, serta perbedaan pemahaman antara pihak pengelola TPST 3R yang berharap dapat diberikan bantuan berupa pendampingan teknis maupun bantuan teknologi tepat guna maupun peralatan yang memadai untuk dapat membuat proses produksi atau pembakaran sampah plastik menjadi lebih aman dengan meminimalisir dampak yang ditimbulkan, dengan pemahaman pemerintah yang tidak ada inisiatif terkait hal tersebut, melainkan harus berdasarkan permintaan dari pemohon dalam bentuk proposal pengadaan barang.

Kendala yang dialami dalam bekerja sama dengan pemerintah adalah mengenai bagaimana untuk dapat menemukan satu titik yang relevan dengan pelaksanaan PSBM. Selain itu, seringkali pemerintah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PSBM di Desa Doplang, namun tanpa diimbangi dengan adanya perencanaan dan penganggaran program untuk mendukung pelaksanaan PSBM.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun belum maksimal karena masih adanya beberapa kendala. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria persyaratan umum pengelolaan sampah permukiman dan identifikasi kendala yang digunakan peneliti untuk mengetahui pelaksanaan PSBM di Desa Doplang.

#### **A. Pelaksanaan PSBM di Desa Doplang**

Dilihat dari aspek persyaratan hukum, pelaksanaan PSBM di Desa Doplang tidak terlepas dari undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Peraturan mengenai kebersihan lingkungan dalam lingkup Desa Doplang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Namun dalam

peraturan desa tersebut tidak memuat mengenai besaran tarif retribusi. Tarif retribusi ditetapkan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak masyarakat dan pengelola TPST di Desa Doplang selaku penyedia jasa.

Dilihat dari aspek persyaratan kelembagaan, komitmen pengelola dalam peningkatan kinerja institusi PSBM di Desa Doplang sudah cukup baik, dengan adanya komitmen yang kuat dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pada tiap unit kegiatan dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Asri untuk terus berinovasi dan mendapat pangsa pasar. Adapun sistem dan institusi persampahan telah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan retribusi, dengan adanya KSM Kampung Asri sebagai kelompok pengolah TPST 3R di Desa Doplang yang beranggotakan sejumlah 50 orang warga sebagai pengurus.

Dilihat dari aspek teknis operasional, penerapan teknik 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di sumber

dan di TPS dalam pelaksanaan PSBM di Desa Doplang, khususnya di Dukuh Karangwuni dan Karangmojo, dianggap memiliki bagian kerja masing-masing. Reduce dan reuse merupakan proporsi masyarakat secara individu karena terkait dengan perilaku, sedangkan recycle merupakan proposi pihak pengelola persampahan di TPST 3R Desa Doplang.

Dilihat dari aspek pembiayaan, struktur pembiayaan dalam PSBM di Desa Doplang pada awalnya hanya berasal dari retribusi warga. Namun uang tersebut hanya dapat digunakan untuk proses pengambilan sampah dan tidak mencukupi untuk dana operasional dalam proses produksi. KSM Kampung Asri juga mendapat bantuan dari pemerintah, diantaranya adalah BLM dari pelaksanaan PNPM Mandiri dan bantuan dari dana desa. Namun bantuan yang berasal dari PNPM Mandiri bukan berupa uang tunai yang dapat langsung diberikan sehingga tidak dapat digunakan

untuk membiayai kegiatan operasional Adapun pola retribusi yang diterapkan di Desa Doplang yaitu melalui jimpitan maupun termasuk ke dalam kas Rukun Tetangga (RT) setiap bulan.

Dilihat dari aspek peran serta masyarakat, bentuk peran serta masyarakat dalam PSBM di Desa Doplang adalah sebagai pemilah sampah pada tiap rumah tangga, beberapa warga bertugas sebagai petugas pengambil sampah, serta beberapa warga menjadi pengelola dalam KSM Kampung Asri dan di TPST 3R. Program yang dilakukan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan membina peran serta masyarakat telah dilakukan tidak hanya dari pengelola TPST 3R, melainkan juga bersinergi dengan tim lain seperti kader kesehatan Desa Doplang dan tim dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Peran aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan juga dalam bentuk tim, yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kerja 4 PKK,

kader kesehatan, Forum Kesehatan Desa (FKD), dan Keluarga Kelompok Tani (Gapoktan).

#### B. Kendala PSBM di Desa Doplang

Kendala internal yang dialami diantaranya adalah PSBM di Desa Doplang mengalami kendala terkait dengan masih kurangnya biaya yang diperlukan TPST 3R Doplang, untuk mendukung kegiatan operasional penanganan sampah, kendala yang berkaitan dengan kuantitas sampah di Desa Doplang yang tidak mencukupi kebutuhan dalam rangka proses produksi inovasi olahan sampah. Adapun sampah yang telah tertangani dengan baik di Desa Doplang masih sebatas di Dukuh Karangwuni dan Dukuh Karangmojo.

Pemahaman masyarakat tentang kebersihan lingkungan belum dapat dikatakan sudah baik, melainkan masih pada tahapan kondisi yang

ingin diciptakan. Kendala yang dialami adalah karena kebersihan lingkungan terkait dengan kebiasaan masyarakat, sehingga memerlukan proses yang panjang untuk dapat mengubah kebiasaan masyarakat untuk dapat sadar mengenai masalah kebersihan lingkungan. Adapun subjek pengarahan pembiasaan tersebut adalah anak-anak. Pemahaman mengenai kebersihan lingkungan di Desa Doplang dilakukan dengan menggunakan pola pendekatan persuasif.

Keaktifan masyarakat dalam memberi masukan berupa kritik dan saran yang membangun dalam PSBM belum dapat dikatakan baik karena sebagian kritik yang disampaikan bersifat tidak membangun.

Kendala eksternal yang dialami dalam PSBM adalah komunikasi dan

koordinasi antara pihak pengelola TPST 3R di Desa Doplang dengan TPA Winong masih kurang. Kendala yang dialami adalah karena kurangnya peran dinas terkait atau pemerintah dalam memfasilitasi adanya koordinasi mengenai keadaan tersebut.

Kesesuaian seluruh tahapan pelaksanaan PSBM yang telah dilakukan dengan prosedur yang ada menjadi suatu kendala, terkait dengan pembakaran sampah yang dilakukan dalam membuat produk olahan sampah. Dalam hal ini peran dinas terkait juga masih kurang mengenai koordinasi hal tersebut.

Kendala yang dialami dalam bekerja sama dengan pemerintah atau dinas terkait yaitu mengenai bagaimana untuk dapat menemukan satu titik yang relevan dengan pelaksanaan PSBM di Desa Doplang, serta seringkali dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan

PSBM tidak diimbangi dengan adanya perencanaan dan prioritas penganggaran program

## **2. Saran**

Terkait dengan aspek persyaratan kelembagaan dan aspek peran serta masyarakat, cakupan wilayah penanganan sampah di Desa Doplang oleh KSM Kampung Asri selaku pengelola TPST perlu untuk diperluas menjadi seluruh kawasan Desa Doplang untuk memaksimalkan kegiatan PSBM yang ada. Sehingga sampah di Desa Doplang dapat ditangani dengan baik secara keseluruhan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Doplang dalam Penanganan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM).

Terkait dengan aspek teknis operasional, pemerintah perlu untuk melakukan pendampingan teknis dan membuka forum untuk dikusi dengan masyarakat dalam rangka

pengembangan kegiatan penanganan sampah berbasis masyarakat di Desa Doplang. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan antara pihak pelaksana kegiatan penanganan sampah dengan pemerintah terjalin komunikasi yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan PSBM di Desa Doplang.

Terkait dengan aspek pembiayaan, pemerintah perlu untuk mengimbangi dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan penanganan sampah berbasis masyarakat di Desa Doplang dengan mempertimbangkan perencanaan dan penganggaran untuk dapat memperoleh prioritas. Sehingga antara pelaksanaan PSBM di Desa Doplang dapat sinkron dengan program yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh dinas terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta : Interpratama Offset.
- Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika
- Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Moleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2007). Manajemen Publik. Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Wahyuningsih, Nur Endah. (2014). Buku Ajar Persampahan. Semarang: UPT Undip Press
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- SNI 3242-2008, Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 13 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah